

PEMDES SRIHARJO LAKUKAN PENDATAAN

Ribuan KK Tinggal di Daerah Rawan Longsor

IMOIRI (KR) - Pemerintah Desa Sriharjo Imogiri terus melakukan pendataan warga yang tinggal di zona merah atau berpotensi terjadinya longsor. Langkah tersebut diambil dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat Sriharjo. Selain ancaman tanah longsor, Desa Sriharjo juga menghadapi persoalan banjir yang terus mengintai berapa rumah warga.

"Untuk korban badai Cempaka tahun 2017 memang sudah kami tempatkan di hunian di Sompok. Tapi kami juga diminta mengirimkan *by name* enam warga yang berada di zona merah rawan longsor. Data tersebut sebagai acuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan rumah hunian di zona aman," ujar Lurah Desa Sriharjo, Titik Istiwayatun Khasanah SPD, Senin (8/6).

Dijelaskan, untuk wilayah Desa Sriharjo hingga saat ini ada warga tinggal di daerah

yang berpotensi terjadinya tanah longsor. Mereka berada di Dusun Wunut, Dusun Sompok serta Pengkol. Di tiga dusun tersebut, ada beberapa warga yang rumahnya berada di daerah rawan longsor. Dengan kondisi seperti itu, tentunya pemerintah desa sangat berharap masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan.

Selain itu ada beberapa rumah warga di Dusun Dogongan berada di daerah rawan banjir. Pemdes tentu mengupayakan mereka yang di zona berbahaya baik longsor dan banjir bisa secepatnya dipindahkan ke hunian aman.

Terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Drs Dwi Daryanto MSI, mengatakan dari jumlah 2.232 KK di daerah rawan longsor, BPBD Bantul sudah merelokasi 165 KK. Pihaknya terus berusaha mengurangi jumlah KK yang hingga kini masih tinggal. (Roy)-d



Hunian korban badai cempaka di Sompok Sriharjo Imogiri.

KR-Sukro Riyadi

SESUAI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Anggaran TPS Butuh Tambahan Rp 6,6 Miliar

BANTUL (KR) - Dana Hibah untuk KPU dalam melaksanakan Pilkada Bantul yang jumlah total mencapai Rp 21,5 miliar baru turun dalam dua termin. Sementara itu anggaran pelaksanaan Pilkada yang rencananya berlangsung Desember mendatang dipastikan membengkak jika mengacu protokol kesehatan Covid-19.

"Untuk anggaran TPS saja yang aturan sebelumnya satu TPS diisi 800 orang, tapi aturan standar Covid-19 diisi maksimal 500 orang. Jika ini terjadi kita memerlukan penambahan 660 TPS. Sementara tiap TPS memerlukan biaya Rp 10 juta. Jadi hanya untuk penambahan TPS saja membutuhkan dana Rp 6,6 miliar," ujar Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho SAnt kepada KR, Senin (8/6).

Didik mengungkapkan dari Rp 21,5 miliar dana hibah KPU, telah digelontor dua termin. Termin pertama Rp 250 juta dan termin kedua Rp 8,5 miliar. Dari dua termin ini telah dibelanjakan sebagian seperti untuk pembayaran honorarium PPK dan biaya kesekretariatan selama satu bulan. Selama 9 bulan masa kerja, mereka baru

bekerja satu bulan dan berhenti akibat pandemi Covid-19.

"Jadi dana hibah Rp 21,5 miliar untuk KPU Bantul adalah hibah yang sudah disepakati sebelum pandemi dan sebelum ada penundaan Pilkada. Pasca Covid-19 dan penundaan Pilkada akan ada penyesuaian anggaran terutama untuk penerapan protokol kesehatan saat pemungutan dan penghitungan suara sampai rekap," urainya.

Pembengkakan anggaran dipastikan akan terjadi tidak hanya untuk pembentukan TPS, tapi juga pelaksanaan Pilkada sesuai standar protap Covid-19 yang harus menyediakan APD, masker, hand sanitizer dan beberapa perlengkapan lain di tiap TPS.

Sementara, Sekda Bantul Helmy Jamharis, menambahkan anggaran hibah senilai Rp 30 miliar ini masing-masing diberikan kepada KPU Bantul Rp 21,5 miliar dan Bawaslu Bantul sebesar Rp 8,5 miliar

"Selain untuk KPU dan Bawaslu, Pemkab juga memberikan dukungan pengamanan melalui Satpol PP dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar," jelasnya. (Aje)-d

PELAYANAN SIM KELILING DIBUKA KEMBALI

Masyarakat Antusias Ikuti Ujian SIM

BANTUL (KR) - Jajaran Satlantas Polres Bantul membuka pelayanan masyarakat pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) baru maupun perpanjangan tanpa batasan jumlah. Tapi pemohon wajib menjalani protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19.

Pihak Satlantas juga memperluas ruang tunggu, yang semula hanya dua tempat, menjadi empat ruang tunggu, termasuk me-

manfaatkan lapangan DPRD Bantul. "Pelayanan kami buka tidak membatasi jumlah pemohon, sehingga kami melayani sampai selesai. Tapi pemohon wajib menaati protokoler kesehatan," tegas Kasatlantas Polres Bantul, AKP Hj Cerryan Nova Madang Putri SH MH didampingi Kanit Regident Satlantas Polres Bantul, Iptu Mulyanta SE MM, Senin (8/6).

Untuk membantu mempercepat pelayanan, Polres

Bantul juga sudah membuka pelayanan lewat SIM keliling khusus di Lapangan DPRD Bantul. Tapi untuk sementara pelayanan SIM Keliling belum dilakukan di tempat lain.

Menurut AKP Cerryan, dengan pelayanan tanpa batasan jumlah, selama tiga hari terakhir ini jumlah pemohon SIM baru maupun perpanjangan rata-rata perhari mencapai 450 orang. Sebelumnya atau awal pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan batasan rata-rata 250 orang.

Pelayanan pemohon SIM selama pandemi Covid-19 juga diberlakukan dispensasi, bagi pemilik SIM yang sudah habis masa berlakunya bisa diperpanjang tanpa mengulangi ujian atau mengajukan permohonan SIM baru. Masa dispensasi perpanjangan tersebut dibatasi hingga tanggal 30 Juni 2020. (Jdm)-d



KR-Judiman

Pemohon SIM wajib menaati protokoler kesehatan.

Zuhandi Jadi Asintel Kejati Bali

BANTUL (KR) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantul, Zuhandi SH MH, menerima jabatan baru sebagai Asisten Intelijen di Kejati Bali. Jabatan Kajari Bantul digantikan Nur Asiyah SH MH yang sebelumnya menjabat Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulawesi Tengah. Serah terima jabatan dilaksanakan di Kejati DIY, hari ini Selasa (9/6).

Setelah itu, Zuhandi pamitan ke Bupati Bantul Drs H Suharsono maupun Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih beserta jajaran Forkompinda Bantul di Kantor

Bupati, Kompleks Parasamya Bantul.

Zuhandi kepada KR di ruang kerjanya, Senin (8/6), mengemukakan ada beberapa program kerja di Kantor Kejari Bantul yang perlu dilanjutkan oleh penggantinya. Yakni, upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sedangkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sudah diraih Kejari Bantul tahun lalu.

Saat ini Kejari Bantul mendapat tugas memberi pendampingan desa dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada warga terdampak Covid-19 berasal dari peralihan dana desa. (Jdm)-d

GBC Bantul Bertekad Menangkan 'Noto'

BANTUL (KR) - Pilkada Bantul rencananya baru digelar awal Desember 2020. Sumber gerakan tim pendukung masing-masing bakal calon bupati terus bermunculan. Jika sebelumnya pasangan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo didukung laskar Bima Garda. Kini giliran calon bupati incumbent Drs H Suharsono-Totok Sudarto (Noto) mendapat suport penuh dari Korda Gerakan Bakti Cendana (GBC) Bantul.

"Kami punya visi dan misi sama dengan

balon bupati Pak Harsono khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Ketua Korda Gerakan Bakti Cendana (GBC) Bantul, Muji Sobari, di sela deklarasi mendukung H Suharsono di Sewon Bantul, Minggu (7/6) sore.

Ketua Posko Harsono Center, Arif Iskandar, mengatakan pelaksanaan Pilkada Bantul di tengah pandemi Covid-19 memang harus bekerja keras. Artinya butuh strategi untuk memperjuangkan kemenangan Harsono-Totok Sudarto. (Roy)-d

1.500 Penerima BLT APBD Dievaluasi

JETIS (KR) - Pemkab Bantul akan mengevaluasi 1.500 penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul. Karena ada indikasi jumlah itu ada kekeliruan dari aspek administrasi hingga kondisi lapangan.

Sementara Bupati Bantul, Drs H Suharsono, Senin (8/6), menyerahkan BLT DD Tahap 2 dan Bansos APBD Tahap 1



KR-Sukro Riyadi

Bupati Bantul Suharsono secara simbolis menyerahkan BLT DD di Desa Srihardono Pundong.

di Balai Desa Patalan Jetis dan Balai Desa Srihardono Pundong. Sekda Bantul, Helmi Jamharis, mengatakan Pemkab Bantul akan cairkan dana sedikitnya untuk 9.352 orang penerima. Dari jumlah itu akan dicairkan dua tahap, setelah yang pertama sebanyak 7.352 orang, kemudian tahap kedua sebanyak 1.500 penerima.

Terkait adanya program pencairan BLT APBD tingkat II tahap 2. Karena setelah diverifikasi terdapat hal-hal yang perlu dicermati lagi, termasuk kekeliruan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kepala Keluarga (KK) yang tidak sama. Harapannya, APBD Kabupaten Bantul sanggup mengcover semua KK yang belum menerima dari manapun.

Helmi mengungkapkan,

BLT APBD Kabupaten Bantul bisa menjadi 'Sapu Jagat' masyarakat. Artinya, KK yang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah bisa tercover. Tahap pertama nanti ada 7.352 penerima dengan alokasi anggaran Rp 13,233 miliar. Warga penerima diminta bersabar, misalnya belum menerima itu karena belum sampai tahapannya.

Kepala keluarga yang berhak menerima BLT APBD Kabupaten Bantul merupakan KK yang masuk kriteria miskin dan belum menerima BPNT, baik reguler maupun perluasan dan juga dari dana desa. Nama-nama penerima itu merupakan usulan dari desa dan hasil dari musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa masing-masing. (Roy)-d

krjogja.com
Lebih Mengerti Jogja
dari JOGJA untuk DUNIA

Redaksi:
Jl. Margo Utomo /
Jl. P. Mangkubumi 40-46
Yogyakarta 55232
redaksi@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 124/128)

Iklan :
iklan@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 124/128)

www.krjogja.com